



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 (KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 (KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019) serta memperhatikan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 1064 Tahun 2019 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 7. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 8. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 9. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
11. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Administrasi Umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah
14. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
15. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
16. Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan dan Patokan Harga Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
17. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
18. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Administrasi Umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah
19. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah
20. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
21. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
22. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris III Bidang Hukum, Pengawasan dan Pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
23. Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
24. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Investasi dan Penanaman Modal Tim Anggaran Pemerintah Daerah
25. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
26. Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
27. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

28. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
29. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah
30. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
31. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Tim Anggaran Pemerintah Daerah
32. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

KESATU :

Menghadiri dan mengikuti pembahasan penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat-rapat pembahasan penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta memimpin Pihak Eksekutif pada rapat-rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan penempatan sebagai berikut :
 1. Asisten Pemerintahan selaku Ketua Bidang Pemerintahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi A;
 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi B;
 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi D;

4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi E; dan
5. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Perekonomian dan Keuangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada komisi C;

guna membahas dan merumuskan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan didampingi oleh Inspektorat, para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, para Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah, para Kepala Bidang Badan Pengelola Aset Daerah, para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta terkait, para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada :

1. setiap rapat pembahasan subbanggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masing-masing Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 2. setiap rapat pembahasan dengan SKPD/UKPD sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan format berita acara hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk ditandatangani oleh para pihak yang mengikuti pembahasan dimaksud sebagaimana format lampiran I dan lampiran II terlampir;
 2. menyiapkan format nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020, nota kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan nota kesepakatan Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2020 antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. melakukan input pagu kegiatan hasil kesepakatan pembahasan; dan
 4. mencatat kronologis setiap rapat pembahasan meliputi salinan undangan, salinan daftar hadir, notulen rapat, rekaman baik berupa suara maupun foto atau video dan laporan.
- d. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta :
1. hadir untuk menyampaikan paparan dan penjelasan program/kegiatan masing-masing SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta dalam forum rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU; dan
 2. melakukan input kesepakatan hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ke dalam sistem e-budgeting secara online di alamat website apbd.jakarta.go.id.

KEDUA : Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta atas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

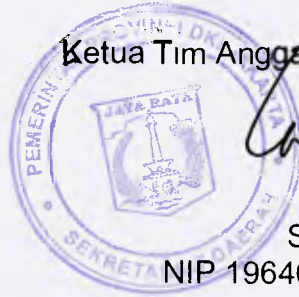
Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah

Nomor 81 TAHUN 2019
Tanggal 9 Agustus 2019

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020/KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
KOMISI

NO	SKPD/UKPD	KEGIATAN	ANGGARAN	TAMBAH/(KURANG)	MENJADI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Kepala Badan Pengelola Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta,

(nama)

NIP

(nama)

NIP

(nama)

NIP

(nama)

NIP

Ketua Komisi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta,

(nama)

NIP

Asisten

Sekda Provinsi DKI Jakarta,

(nama)

NIP



Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,

selaku
[Signature]

Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim Anggaran
 Pemerintah Daerah

Nomor 81 TAHUN 2019
 Tanggal 9 Agustus 2019

BERITA ACARA
 HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020/KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
 ANTARA BADAN ANGGARAN DPRD DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	SKPD/UKPD	URAIAN/KEGIATAN	RANCANGAN KUA-PPAS 2020/RANCANGAN KUPA-PPAS PERUBAHAN 2019	TAMBAH	KURANG	KUA-PPAS 2020/RANCANGAN KUPA-PPAS PERUBAHAN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Jakarta,

Pimpinan Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPAD, TAPD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bappeda,
 Kepala BPKD, Kepala BPRD,

H. Ferrial Sofyan H. Ichwan Zayadi, S.E. (nama) (nama)
 Inspektur Kepala BPRD,

Ir. H. Triwisaksana, M.Sc. H. Mohammad Taufik (nama) (nama)

Ketua Badan Anggaran,

Sekretaris Daerah,

H. Prasetyo Edi Marsudi, S.H.

Saefullah
NIP 196402111984031002

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002